

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Maluku 408895 adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kemeterian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408895 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Akuntansi Bogor. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, Januari 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran



Hendro Tri Prasetyo  
NIP. 196611241986031001

**DAFTAR ISI**  
**TAR ISI**

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**KANTOR AKUNTANSI BOGOR**  
*Jalan Sultan Babullah Nomor 17-18 Ambon 97115*  
**TELEPON. (0911) 352803, FAXIMILE 352807**

---

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408895 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Ambon, Januari 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran

Hendro Tri Prasetyo  
NIP. 196611241986031001

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Maluku Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp.3.163.518.135 atau mencapai 60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.170.618.000

### **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.(0)

### **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.3.163.518.135 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(3.163.518.135) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0 dan sebesar Rp.(3.163.518.135) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(3.163.518.135)

### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(3.163.518.135) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.3.163.518.135 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.(6.104.680)

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**KANTOR WILAYAH MALUKU**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Cat.	Th 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	% Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	-			
<b>Jumlah Pendapatan dan Hibah</b>		-	-	-	-
<b>BELANJA</b>	B.2				
Belanja Pegawai	B.3				
Belanja Barang	B.4	3.170.618.000	3.163.518.135	7.099.865	99,78
Belanja Modal	B.5				
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.170.618.000</b>	<b>3.163.518.135</b>	<b>7.099.865</b>	<b>99,78</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**KANTOR WILAYAH MALUKU  
NERACA**

**PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.1.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	C.2		
Tagihan TP/TGR	C.2.1		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.2		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.2.3		
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>			
<b>ASET TETAP</b>	C.3		
Tanah	C.3.1	-	-
Peralatan dan Mesin	C.3.1	-	-
Gedung dan Bangunan	C.3.2	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.3.2	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.3.3	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.3.4	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.3.5	-	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	C.4		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	C.4.1	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4.2	-	-
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>	C.5		
Aset Tidak Berwujud	C.5.1	-	-
Aset Lain-Lain	C.5.2	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.5.3	-	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		-	-
<b>KEWAJIBAN</b>	C.6		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.6.1		
Uang Muka dari KPPN	C.6.2	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6.3	-	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.6.4	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.6.5	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>	C.7		
Ekuitas	C.7.1	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		-	-

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**III. LAPORAN OPERASIONAL**  
**KANTOR KANTOR WILAYAH MALUKU**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember**  
**2022**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Cat.	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2		
Beban Persediaan	D.3		
Beban Barang dan Jasa	D.4	510.598.940	127.899.000
Beban Pemeliharaan	D.5		
Beban Perjalanan Dinas	D.6	606.156.463	262.763.549
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9		
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		
JUMLAH BEBAN		1.116.755.403	390.662.549
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.116.755.403)	(390.662.549)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	D.12	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13		
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.14		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya	D.15		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	D.16		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.17		
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.18		
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.19	(1.116.755.403)	(390.662.549)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB	D.13		
Beban Perjalanan Dinas	D.14		
Beban Persediaan	D.15		
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.116.755.403)	(390.662.549)

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***



**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**KANTOR KANTOR WILAYAH MALUKU**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.163.518.135)	(1.373.987.925)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTASI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
<b>JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.163.518.135	1.373.987.925
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>			-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	-	-

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis*

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi Bogor

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Mempunyai Tugas dan Fungsi dalam Melakukan Koordinasi Dibidang Bimbingan dan Dukungan Implementasi Akuntansi Pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Maluku. Melalui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku berkomitmen dengan visi dan misi:

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia”

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi Keuangan yang dihasilkan oleh system akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan system informasi yang andal dan terpercaya.

Menyelenggarakan system dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408895. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis Akuntansi*

#### A.3 Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408895 menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408895 dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408895. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408895 adalah sebagai berikut:

*Pendapatan- LRA*

##### **(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan LO*

#### **(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

#### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

#### *Aset*

#### **5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

#### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
  - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas  
Pos Laporan  
Realisasi  
Anggaran

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408895 memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.170.618.000. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Wilayah yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

### Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	3.170.618.000	0
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.170.618.000</b>	<b>0</b>

### B.1 Pendapatan

Realisasi  
Pendapatan Rp.0

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 119,64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Akuntansi Bogor terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
Pendapatan Pendidikan	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Pendapatan Pendidikan TA 2023 mengalami kenaikan 0.00 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh mulai meningkatnya aktivitas Pelaksanaan Diklat pada Kantor Akuntansi Bogor. Selain itu, terdapat peningkatan Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha sebesar 0.00 persen yang berasal pendapatan sewa atas lahan untuk ATM oleh Bank Berdikari. Pada pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 0.00 persen karena berkurangnya pendapatan pengembalian atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari tahun anggaran yang lalu. Pendapatan lain-lain TA 2023 terdiri dari pengembalian belanja pegawai dan belanja modal. Atas pengembalian belanja modal tersebut sudah dilakukan koreksi atas nilai Komputer senilai Rp.0

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022  
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0.00
Pendapatan Pendidikan	0	0	0.00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Realisasi Belanja  
Rp.3.163.518.135

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja Kantor Akuntansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp.3.163.518.135 atau 99,78% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.170.618.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023  
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0.00
Belanja Barang	3.170.618.000	3.163.518.135	60
Belanja Modal	0	0	0.00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3.170.618.000</b>	<b>3.163.518.135</b>	<b>60</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.170.618.000</b>	<b>3.163.518.135</b>	<b>60</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 35.17 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan Realisasi Belanja  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	3.163.518.135	1.373.987.925
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.163.518.135</b>	<b>1.373.987.925</b>

*Belanja Pegawai* **B.3 Belanja Pegawai**  
Rp0

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dari TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0.00
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	0.00
Belanja Honorarium	0	0	0.00
Belanja Lembur	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Belanja Barang  
Rp3.163.518.135

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.163.518.135 dan Rp390.662.549 Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 184.30% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19
2. Peningkatan Belanja Barang Non Operasional, untuk Kegiatan pengamatan/penyusupan/penyurupan/penelitian/penjajakan dan Pemantauan masyarakat pada kegiatan divisi keimigrasian
3. Peningkatan Belanja Jasa Profesi untuk mengundang praktisi sebagai narasumber pada kegiatan TIM Pora
4. Peningkatan Belanja Barang Perjalanan Dinas untuk kegiatan pembinaan dan koordinasi.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional	31.797.000	24.679.000	28.84
Belanja Barang Non Operasional	367.001.940	94.043.000	290.2
Belanja Persediaan	0	0	0.00
Belanja Jasa	111.800.000	9.177.000	1.118
Belanja Pemeliharaan	0	0	0.00
Belanja Perjalanan Dinas	600.051.783	262.763.549	128.4
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.163.518.135</b>	<b>1.373.987.925</b>	<b>184.30</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.163.518.135</b>	<b>1.373.987.925</b>	<b>184.30</b>

Belanja Modal  
Rp0

#### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0.00% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh rencana peningkatan kapasitas kerja Satker Kantor Akuntansi beberapa tahun kemudian sehingga perlu membeli lahan baru untuk pembangunan Gedung Kantor nantinya. Selain itu, peningkatan belanja modal disebabkan adanya renovasi Gedung Kantor, pembelian peralatan yang akan digunakan pada gedung yang sudah selesai direnovasi

dan untuk peningkatan fasilitas jaringan untuk menunjang pelaksanaan tuisi Satker.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Belanja Modal Tanah Rp0

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp0

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Komputer Unit	0	0	0.00
A.C Split	0	0	0.00
Meja dan Kursi	0	0	0.00

<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0*

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0.00persen dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>
Renovasi Gedung Kantor	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

*Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0*

### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

*Belanja Bantuan Sosial Rp0*

### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0.00% dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Aset Lancar Rp0*

**C.1. Aset Lancar**

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di Bendahara*

*Pengeluaran*

*Rp0*

**C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Uang Tunai</b>	0	0
<b>Bank Mandiri KC Ambon Pattimura (BPG 061 Kanwil Kemkumham Ambon-8100124088951000)</b>	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Kas di Bendahara*

*Penerimaan*

*Rp0*

**C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Tabel xx*

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp0

### C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Piutang Bukan Pajak  
Rp0

### C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi  
(TP/TGR)  
Rp0

### C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

#### Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:



*Tabel xx*  
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	-	0	0
2.	-	0	0
3.	-	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bagian Lancar Tagihan  
Penjualan Angsuran  
Rp.0

**C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

*Tabel xx*  
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	-	0	0
2.	-	0	0
3.	-	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Jk. Pendek  
Rp.0

**C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Akuntansi Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.  
Pendek  
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-

<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
<b>Lancar</b>	0	0,5%	0
<b>Kurang Lancar</b>	0	10%	0
<b>Diragukan</b>	-	50%	-
<b>Macet</b>	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Beban Dibayar di Muka  
Rp.0

### C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Akuntansi Bogor per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Pembayaran Internet</b>	0	0
<b>Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin</b>	0	0
<b>Pembayaran Sewa Gedung Kantor</b>	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pendapatan yang  
Masih Harus Diterima  
Rp0

### C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah Maluku 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Pendapatan Jasa Pelatihan</b>	0	0
<b>Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan</b>	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Persediaan

Rp0

### C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp.0 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Aset Tetap

Rp.0

### C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Maluku berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp0

#### C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Maluku Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</b>	-
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

Peralatan dan Mesin  
Rp0

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0  
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Pembelian</b>	0
<b>Hibah</b>	0
<b>Transfer Masuk</b>	0
<b>Koreksi Tambah</b>	0
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Penghentian aset dari penggunaan</b>	0
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</b>	0
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

Gedung dan Bangunan  
Rp0

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0  
Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Pembangunan Gedung</b>	0
<b>Mutasi Kurang:</b>	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023</b>	0
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp0

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi</b>	0

<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Koreksi Pencatatan</b>	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023</b>	0
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

Mutasi tambah:

Berupa penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya

Rp.0

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut berikut sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
-	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
-	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</b>	0
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

Konstruksi Dalam

Pengerjaan Rp0

### C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya pada Kantor Wilayah Maluku belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

Rp0

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

*Tabel xx*  
*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*  
*(dalam rupiah)*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Piutang Jangka Panjang  
Rp0

### C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Maluku Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Akuntansi Bogor merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)  
Rp.0

#### C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Maluku Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	-	0	0
2.	-	0	0
3.	-	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

#### C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. Dan Rp0 berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	-	0	0
2.	-	0	0
3.	-	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang Rp0

### C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Akuntansi Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel xx  
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.  
Panjang  
TA 2023

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tagihan TPA</b>			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Aset Lainnya  
Rp.0

### C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Maluku Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Maluku terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud  
Rp.0

#### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Akuntansi Bogor berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Pembelian</b>	0
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>
<b>Amortisasi s.d. 31 Desember 2023</b>	0
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

*Tabel xx*  
*Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023*  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Nilai
1.	-	0
2.	-	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

*Aset Lain-Lain*  
*Rp0*

#### **C.4.2. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp0 Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Akuntansi Bogor. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Aset Lain-lain*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Reklasifikasi dari Aset Tetap</b>	0
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Penggunaan kembali BMN yang dihentikan</b>	-
<b>Penghapusan BMN</b>	0
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>
<b>Amortisasi s.d. 31 Desember 2023</b>	0
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

*Akumulasi Penyusutan*  
*dan Amortisasi Aset*  
*Lainnya Rp0*

#### **C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset*  
*Lainnya TA 2023*  
*(dalam rupiah)*



No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
<b>A.</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>			
1.	Software	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kewajiban Jangka Pendek Rp16.104.680

Uang Muka dari KPPN Rp10.000.000

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.0

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Maluku Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

#### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

#### C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 22 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Akuntansi Bogor per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	0
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada *Treasury Notional Pooling (TNP)* dan belum disetorkan ke kas negara per tanggal pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan Uang Makan Desember 2022 yang belum dibayarkan kepada para pegawai Kantor Akuntansi Bogor per tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka Rp.0

### C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023  
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp.0

### C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
<b>Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar</b>	0	0
<b>Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar</b>	0	0
<b>Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar</b>	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ekuitas Rp.(0)

### C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.(0) dan Rp0. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP Rp.0

## PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0  
Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0.0
Pendapatan Pendidikan	0	0	0.0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0.0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

Beban Pegawai  
Rp0

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Gaji	0	0	0.00
Beban Tunjangan-tunjangan	0	0	0.00
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0.00
Beban Lembur	0	0	0.00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Beban Pegawai  
Rp.0

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0.00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0.00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0.00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Beban Barang dan Jasa  
Rp.1.188.613.958

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.188.613.958 dan Rp.686.032.988. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

#### Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0.00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0.00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	0	0	0.00
Beban Honor Operasional Satker	0	0	0.00
Beban Bahan	82.925.000	12.770.000	54.9
Beban Langganan Listrik	0	0	0.00
Beban Langganan Telepon	0	0	0.00
Beban Sewa	109.000.000	8.000.000	12.63
Beban Jasa Profesi	2.800.000	0	100
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Honor Output Kegiatan	11.400.000	10.650.000	7
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	31.797.000	24.679.000	29
Beban Barang Non Operasional Lainnya	272.676.940	70.623.000	28.6
Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	-	1.177.000	(100)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.188.613.958</b>	<b>686.032.988</b>	<b>86</b>

Beban  
Pemeliharaan  
Rp0

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0.00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp.1.974.904.177

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.974.904.177 dan Rp.687.954.937. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.974.904.177	687.954.937	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0.00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.974.904.177</b>	<b>687.954.937</b>	<b>0.00</b>

Beban Barang  
untuk Diserahkan

#### D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Kepada Masyarakat Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Beban Bantuan Sosial Rp.0

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0.00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.0

#### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Beban Amortisasi Software	0	0	0.00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	0.00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Beban  
Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih Rp.0

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0.00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Kegiatan Non  
Operasional Rp0

**D.11 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penjualan Alat Kantor	0	0	0.00
Selisih Kurs	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

*Pos Luar Biasa* **D.12 Pos Luar Biasa**  
*Nihil*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp0*

**E.1. Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

*Defisit LO*  
*Rp(3.163.518.135)*  
*)*

**E.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp.(3.163.518.135) dan Rp.(390.662.549). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi*  
*Rp0*

**E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset*  
*Rp0*

**E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp.0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan*  
*Rp0*

**E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan**



Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2022

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>

Selisih Revaluasi Aset Rp.0

#### E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp.0

#### E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Koreksi Lain-lain Rp.0

#### E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Transaksi Antar Entitas Rp3.163.518.135

#### E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.3.163.518.135 dan Rp. 1.373.987.925 Transaksi Antar

Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Tabel xx*  
*Transaksi Antar Entitas TA 2023*

Jenis Persediaan	Koreksi
<b>Diterima dari Entitas Lain</b>	1.373.987.925
<b>Ditagihkan ke Entitas Lain</b>	0
<b>Transfer Masuk</b>	0
<b>Transfer Keluar</b>	0
<b>Pengesahan Hibah Langsung</b>	0
<b>Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung</b>	-
<b>Jumlah</b>	1.373.987.925

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp3.163.518.135

**E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari:

*Tabel xx*  
*Transfer Masuk TA 2023*

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	-	0
2.	Persediaan	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>

**E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*

*Pengesahan Hibah Langsung TA 2023*

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	UNICEF	Uang	0
2.	Universitas AKA	Barang	0
<b>Total Pengesahan</b>			<b>0</b>
<b>Pengesahan Pengembalian Hibah</b>			-
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>

*Ekuitas Akhir  
Rp(0)*

**E.6. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.(0) dan Rp.0

**PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

**F.1 Pengungkapan Lain-lain**

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KU.02.03 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 15 Maret 2022 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Nomor : W.28-28.KU.02.03 Tanu 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP, Staff Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengolah Administrasi Belanja Pegawai, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satua Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Hendro Tri Prasetyo  
 Pejabat Pembuat Komitmen : Lineke Baura  
 Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Slamet Pramodji  
 Bendahara Pengeluaran : Maichel W Huwae  
 Bendahara Pengeluaran Pembantu : Sartika Chandra Devi

**F.2 Pengungkapan Lain- Lain**

Laporan Kinerja Pada Program Dipa Imigrasi Adalah Sebagai Berikut :

1. Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Maluku Target Kinerja dengan Anggaran Belanja sebesar Rp.3.170.618.000 dengan Realisasi sebesar Rp.3.163.518.135 mencapai 99,78 Persen